



TESIS

Judul:

Kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum
Adat Bali

Disusun oleh:

ANAK AGUNG GEDE BAGUS PURNAWAN
NIM. 217231024

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANEGARA
2025

Kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum
Adat Bali

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun oleh:

ANAK AGUNG GEDE BAGUS PURNAWAN
NIM. 217231024

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANEGARA
2025

Pengesahan

Nama : ANAK AGUNG GEDE BAGUS PURNAWAN
NIM : 217231024
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul Tesis : Kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif
Hukum Adat Bali
Title : The Position of Marriage Agreements in the Perspective of
Balinese Customary Law

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 23-Desember-2024.

Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.Hum, M.M., Dr., MKn., Prof
2. I WAYAN GDE WIRYAWAN, Prof.,Dr.,S.H.,M.H.
3. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.

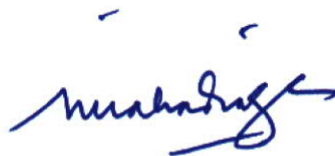
Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
I WAYAN GDE WIRYAWAN,
Prof.,Dr.,S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10223003



Jakarta, 23-Desember-2024

Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum.,Dr.

Persetujuan

Nama : ANAK AGUNG GEDE BAGUS PURNAWAN
NIM : 217231024
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : Kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif
Hukum Adat Bali

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 28-November-2024

Pembimbing:
I WAYAN GDE WIRYAWAN,
Prof.,Dr.,S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10223003



ABSTRAK

Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan bagi pasangan suami istri terkait pengelolaan harta dan tanggung jawab finansial. Dalam masyarakat adat Bali yang sangat menjunjung tinggi kesakralan perkawinan, konsep perjanjian perkawinan sering kali bertentangan dengan norma adat yang berbasis kolektivisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pengaturan perjanjian perkawinan dalam hukum nasional dan kedudukannya dalam perspektif hukum adat Bali. Melalui metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis-empiris, ditemukan bahwa meskipun perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, penerapannya di masyarakat adat Bali menghadapi tantangan signifikan. Kesakralan perkawinan dalam adat Bali yang melibatkan Tri Upasaksi menjadi hambatan utama terhadap penerimaan konsep pemisahan harta. Namun, fleksibilitas hukum adat seperti dalam sistem pada gelahang memberikan ruang untuk menyesuaikan tradisi dengan kebutuhan modern tanpa melanggar nilai-nilai adat.

Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Hukum Adat Bali, Kesakralan Perkawinan, Kebebasan Berkontrak

ABSTRACT

A marriage contract is a legal instrument that provides protection for married couples regarding the management of assets and financial responsibilities. In Balinese traditional society that highly upholds the sanctity of marriage, the concept of a marriage contract often conflicts with customary norms based on collectivism. This study aims to analyze the basis for regulating marriage contracts in national law and its position in the perspective of Balinese customary law. Through a normative research method with a juridical-empirical approach, it was found that although marriage contracts are regulated in Article 29 of Law Number 1 of 1974 and strengthened by the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, its implementation in Balinese traditional society faces significant challenges. The sanctity of marriage in Balinese custom involving Tri Upasaksi is the main obstacle to the acceptance of the concept of separation of assets. However, the flexibility of customary law such as in the gelahang system provides room to adapt traditions to modern needs without violating customary values.

Keyword : Marriage Agreement, Balinese Customary Law, The Sanctity of Marriage, Freedom of Contract

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat Menyusun dan menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul : “Kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Bali”.

Penulisan tesis ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan dalam menempuh serta mencapai gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Dalam penulisan tesis ini, penulis menadapatkan arahan serta bimbingan yang sangat berarti sehingga penulis mampu menuntaskan pengerjaan tesis ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.
2. Dr. Mia Hadiati, S.H, M.Hum., selaku Kepala Program Studi M.K.n., Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang dengan sabar membimbing penulis dalam penyusunan Tesis ini.
4. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Kenotariatan Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama proses perkuliahan.
5. Keluarga tercinta yang selalu mendukung, mendoakan, serta memberikan semangat dan penghiburan yang tak henti-hentinya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini dengan baik.
6. Teman-teman di Universitas Tarumanagara dan di luar Universitas Tarumanagara serta seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Kenotariatan Universitas Tarumanagara sejak awal perkuliahan sampai dengan Penulis menyelesaikan perkuliahan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya.

Sekali lagi Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung Penulis. Setiap orang yang Penulis temui

selama ini telah mengajarkan penulis tentang banyak hal, semoga kedepannya Penulis dapat menjadi pribadi yang selalu mau belajar, rendah hati, dan dapat menjadi lebih baik lagi.

Jakarta, 03 Desember 2024

Anak Agung Gede Bagus Purnawan

Pernyataan

Nama : ANAK AGUNG GEDE BAGUS PURNAWAN
NIM : 217231024
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : Kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Bali

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28-November-2024
Yang menyatakan

M: 

ANAK AGUNG GEDE BAGUS PURNAWAN
NIM. 217231024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis	8
1. Kerangka Konseptual	8
2. Kerangka Teori.....	13
E. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian	22
2. Jenis Pendekatan	22
3. Sumber Bahan Penelitian	23
4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	25
F. Sistematika Penulisan	25
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	28
A. Kajian Pustaka.....	28
B. Konsep	33
C. Teori	36

1. Teori Perlindungan Hukum	36
2. Teori Living Law	37
3. Teori Keadilan Distributif.....	37
4. Teori Efektivitas Hukum	37
5. Teori Keadilan Komutatif.....	37
6. Teori Relasi Sosial	38
7. Teori Konflik Norma.....	38
8. Teori Rasionalitas Instrumental	38
9. Teori Multikulturalisme Hukum	38
10. Teori Keseimbangan Hukum	39
BAB III DASAR PENGATURAN PERJANJIAN PERKAWINAN	
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI	40
A. Dasar Pengaturan Perjanjian Perkawinan Nasional	40
B. Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Bali	63
BAB IV KEDUDUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM	
PERSPREKTIF HUKUM ADAT BALI.....	91
A. Perkawinan Adat Bali.....	91
B. Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Pada Masyarakat	
Hukum Adat Bali.....	115
BAB V PENUTUP	148
A. Kesimpulan	148
B. Saran.....	151
DAFTAR PUSTAKA	153
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

HAM	adalah	Hak Asasi Manusia
HKI	adalah	Hak Kekayaan Intelektual
KUA	adalah	Kantor Urusan Agama
KUHPerdato	adalah	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UU	adalah	Undang-Undang
UUD	adalah	Undang-Undang Dasar

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup	157
Lampiran 2	Keputusan Dekan Pembimbing Tesis	158
Lampiran 3	Rekap Bimbingan Tesis.....	161
Lampiran 4	Surat Keterangan Turnitin Tesis	162
Lampiran 5	Hasil Turnitin Tesis.....	163
Lampiran 6	Surat Keterangan Jurnal	166
Lampiran 7	Hasil Turnitin Proposal Tesis	167